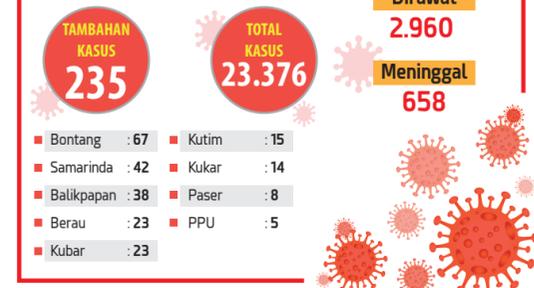


DATA UPDATE COVID-19 KALTIM

KAMIS (17/12)



PUTRI/ DISWAY KALTIM

Sesak

Andi Sri Juliarty mengaku mendapat laporan dari rumah sakit terkait kondisi Ketua DPRD. "Si-loam melaporkan ke kami, beliau memiliki gejala mengarah ke covid sehingga ditetapkan sebagai suspek sambil menunggu hasil swabnya," kata Andi. Saat ini, Makmur sudah berada di ICU (Intensive Care Unit) RSKD.

Sebelum mengeluh sesak napas, Makmur mengikuti berbagai agenda dewan. Sejak Kamis (10/12), agenda DPRD Kaltim memang sangat padat. Mulai Rapat Badan, Rapat Komisi, Rapat Pansus, hingga pengesahan APBD 2021.

Pada hari Jumat (11/12) misalnya, Ketua Menghadiri Rapat Paripurna ke-34 membahas Pengesahan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kaltim Masa Persidangan II Tahun 2020. Lalu dilanjutkan Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021. Kemudian dilanjutkan Rapat Paripurna ke 35 tentang Penyampaian Laporan Hasil Reses/ Serap Aspirasi Anggota DPRD Kaltim Masa Persidangan III Tahun 2020. Saat itu, Makmur mengkritik pemerintah daerah yang tak mendukung agenda serap aspirasi anggota dewan.

Sehari kemudian, tepatnya hari Sabtu (12/12) dan Minggu (13/12) dilanjutkan Rapat Paripurna ke-36 tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021. (Selengkapnya: lihat grafis)

Meski Ketua DPRD Kaltim belum dipastikan terkonfirmasi COVID-19, namun tim medis melakukan tindakan sesuai protokol kesehatan. Apalagi, sehari kemarin ada pejabat yang terkonfirmasi positif. Mereka adalah Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Muhammad Najib, dan Dwi Haryono. Juga Sekretaris, Uni Eka Wirawati.

Kemarin, Kaltim mencatat tambahan kasus cukup banyak: 235. Tambahan terbesar dari Bontang sebanyak, 67 kasus, kemudian Samarinda, 42 kasus, disusul Balikpapan, 38 kasus. Dengan tambahan itu, maka total kasus mencapai 23.376 orang, 19.758 sembuh, 2.960 menjalani perawatan dan 658 meninggal dunia.

14,5 TON APD

Untuk menangani COVID-19, Pemerintah Provinsi Kaltim mendatangkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti baju hazmat, masker, cairan disinfektan, vitamin, dan hand sanitizer. Barang-barang sebesar 14,5 ton itu, tiba kemarin dari Jakarta. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Yudha Pranoto mengatakan pengadaan barang penanganan COVID-19 dipesan sesuai lisensi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami tidak berani sembunyi. Karena APD sekarang banyak yang jual. Tapi keasliannya, tidak terjamin," ujar Yudha. Saat hadir menemui Gubernur Kaltim, Isran Noor menerima kedatangan barang APD secara simbolis. Di Bandara APT Pranoto Samarinda. Pengadaan APD ini menyedot anggaran senilai Rp 9,5 miliar. Yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) provinsi Kaltim tahun 2020. Yudha menyebutkan, pengadaan APD ini nantinya akan dibagikan ke 10 kabupaten/kota di Kaltim. Sesuai dengan kategori peningkatan kasus di masing-masing daerah. "Mana yang parah kondisi penyebaran COVID-nya, kita kasih lebih. Terutama, dalam pantauan kami, Kutim dan Kukar," ujarnya.

Untuk pengadaan vaksin di Kaltim, Yudha menyebut, saat ini masih dalam proses uji coba di pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat diharapkan sabar menunggu. Pengadaan vaksin ditarget bisa dilakukan pada awal tahun depan. Kaltim sendiri, diketahui mendapat jatah 2,2 juta vaksin. Yang akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Isran Noor menyatakan komitmennya dalam penanganan COVID-19 di Kaltim. Dengan pengadaan APD ini, diharapkan dapat membantu penanganan COVID-19 di daerah.

"Akan didrop ke seluruh rumah sakit rujukan di kabupaten/kota," ucap Isran. Melihat kondisi ini, Pemprov Kaltim berencana untuk memperpanjang masa penutupan Kejadian Luar Biasa (KLB) status tanggap darurat bencana penyakit COVID-19. Yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang. (krv/tor/yos)

Vaksin atau Plasma?

SAMARINDA - Berbagai macam kabar soal vaksin hari ini beredar. Mulai dari list harga 6 vaksin yang tersebar di Indonesia. Hingga keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin untuk masyarakat.

Menariknya, kabar itu tersebar hampir bersamaan. Dalam waktu berdekatan. Dan menimbulkan kebingungan. Seperti yang disampaikan Pengamat Sosial, Purwadi.

Dikatakan pria yang juga akademisi di Universitas Mulawarman ini, kabar tersebut sangat berdekatan dan cukup menimbulkan banyak pertanyaan. Lalu, beberapa vaksin seperti AstraZeneca, Sinovac, Bio Farma, Pfizer, Moderna, Sinopharm sudah memiliki harga tertentu. Dari Rp 57 ribu, hingga Rp 2,1 juta.

Menanggapi itu, Purwadi menyampaikan agar kualitas vaksin juga harus dipastikan keampuhannya. Terlebih tiap vaksin memiliki dosis yang berbeda.

"Apakah ada dampak? Apakah ada kerugian? Kenapa bisa begitu? Itu semua kan pertanyaan yang timbul dikalangan masyarakat," jelas Purwadi, baru-baru ini.

Purwadi membeberkan dengan jumlah penduduk yang sampai 200 juta.

Lalu, dengan beberapa daerah yang remote pemerintahannya juga jauh. Unsur pendistribusian juga perlu diperhatikan. Agar kualitas vaksin bisa tetap terjaga. Dibeberkan oleh Purwadi, beberapa pihak swasta juga ada yang sudah membuka pendaftaran untuk vaksin mandiri. Vaksin mandiri sendiri ditujukan untuk masyarakat yang memiliki dana lebih dan bisa langsung mendaftar ke pihak swasta.

"Artinya kan, ini jadi begini. Persentase di swasta 70 persen, ke negara 30 persen. Berbeda, penyerahan grafik kesehatan ke masyarakat. Terus negara lepas tangan," sindir Purwadi.

Dilanjutkan Purwadi, risiko-risiko dan tingkatan dosis yang berbeda juga

Apakah ada dampak? Apakah ada kerugian? Kenapa bisa begitu? Itu semua kan pertanyaan yang timbul dikalangan masyarakat.

PURWADI

di, jangan sampai kalimat gratis itu membuat masyarakat jadinya harus mengantar panjang. Namun, dengan

bisa jadi peluang bisnis. Yang memang berpotensi untuk menyembuhkan, bisa saja ditaruh di rumah sakit yang berkelas. Kesimpangsiuran seperti itu yang dikhawatirkan Purwadi.

Kemudian, mengenai kabar penggratiskan vaksin dari Presiden. Ditanggapi Purwadi, kebenaran tersebut harus diyakinkan. Seperti, apakah seluruh masyarakat mendapatkan? Atau bagaimana? Karena menurut Purwadi, penerimaan jatah vaksin untuk Indonesia baru 20 persen dari jumlah penduduk.

"Mau nunggu sampai kapan kita dapat gratisnya, harus clear dulu disitu," tandasnya.

Diungkapkan Purwadi, jangan sampai kalimat gratis itu membuat masyarakat jadinya harus mengantar panjang. Namun, dengan

kepastian yang tidak ada ujungnya. Lebih lanjut, mengenai plasma yang juga bisa menjadi alternatif lain selain vaksin, diakui Purwadi jika hal tersebut benar adanya, bisa saja itu lebih diminati.

Dan berpeluang tinggi untuk bisa dilakukan. Walaupun kondisi di lapangan, banyak penolakan terhadap plasma tersebut.

"Daripada menggunakan rapid yang hanya 30 persen tingkat keakuratannya, buat apa? Lebih efisien kan jadinya jika plasma itu benar ada. Soal akurasi rapid saja masih simpang siur," ujarnya.

Purwadi menyatakan kepada pemerintah pusat, provinsi juga daerah untuk tidak terburu-buru. Tidak mendewakan vaksin.

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) juga harus tetap diterapkan. Karena kecurigaan rutinnya penanaman vaksin, isu Prokes akan dicabut justru lebih mengkhawatirkan.

"Beberapa tempat kan covid, naik terus, jangan sampai itu (Prokes) dilepas, angka kasusnya meninggi karena pemerintah terlalu mendewakan vaksin," katanya. (nad/yos)

Hitung Cepat KPU Tak Berubah

BALIKPAPAN - Data penghitungan di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengalami perubahan sepanjang Kamis (17/12). Data yang ditampilkan di situs pilkada2020.kpu.go.id menampilkan hasil yang sama pada sehari sebelumnya.

Dari sembilan daerah penyelenggara pilkada, baru 5 daerah yang sudah menyelesaikan penghitungan. Di antaranya Balikpapan, Bontang, Kutai

Barat, Berau dan Paser.

Empat daerah yang belum menyelesaikan penghitungan yakni, Kutai Kartanegara yang baru mencantumkan hasil penghitungan 1.028 TPS dari 1695 TPS (60,65%). Kemudian Kutai Timur sebanyak 502 TPS dari 769 TPS (65,28%). Dilanjutkan Mahakam Ulu yang menyelesaikan penghitungan 66 TPS dari 85 TPS (77,65%). Terakhir Kota Samarinda

yang menyelesaikan penghitungan 1.356 dari 1.962 TPS (69,11%). Perolehan suara sementara itu tidak mengubah posisi pemenang.

Sementara situs KPU telah menyelesaikan penghitungan di Balikpapan, pasangan Rahmad Mas'ud-Thohari Aziz mendapatkan 160.741 suara atau 62,4% memilih. Di Kutai Barat, pasangan FX Yapan-Edyanto Arkan dipilih oleh

49.191 orang, atau 61,1%.

Sedangkan pasangan Seri Marawiyah - Agus Tantomo hanya memperoleh dukungan 46.208 suara atau 42,0%, dari pasangan Sri Juniarsh Mas - Gamalis yang dipilih 63.712 atau 58,0% warga Berau. Sedangkan di Paser, anak mantan bupati setempat unggul dari tiga lawannya dengan perolehan suara 57.813 atau 46,0% (yos)

Kukar

"Kemudian harinya kita coba jadi tiga hari. Karena itu kami uji coba. Misalnya ada yang terpapar, sekolah kami tutup lagi. Cek kembali. Ketika sudah normal dibuka lagi," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mendukung konsep ini. "Saya sudah menerima laporan dari Disdikbud Kukar, mereka sudah mengantisipasi banyak hal," kata dia.

Baik sistem pengajaran, pengaturan ruang kelas, sampai penerapan protokol kesehatan. "Itu sebagai salah satu antisipasi mencegah penyebaran virus di lingkungan sekolah," katanya, baru-baru ini.

"Ketika nanti sudah ditentukan kebijakan kita boleh melakukan kegiatan belajar luring atau bisa tatap muka langsung, tentunya dari Disdikbud Kukar telah siap," jelasnya.

Ditanya mengenai ancaman penularan di antara siswa, ia meminta pihak sekolah meniadakan jam istirahat. "Tidak boleh berlama-lama di sekolah. Setelah pembelajaran langsung

pulang. Memang yang berisiko itu, pada saat mereka istirahat bergabung dengan teman-temannya. Dan kalau diantar jemput orang tuanya, masih aman," bebernyanya.

Samsun menyarankan, jika PTM diterapkan awal tahun harus ada evaluasi setiap minggu. Hal itu untuk mengantisipasi jika ada yang terkonfirmasi positif.

"Kukar akan menjadi pilot project sebagai uji sampling di 10 kabupaten/kota. Kalau siap, akan kami sosialisasikan ke daerah lain," ungkapnya. Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menambahkan, sesuai dengan SKB empat menteri pihaknya pun melihat proses persiapan dari Disdikbud Kukar dalam mempersiapkan PTM.

Ia meminta persiapan PTM dilakukan sesuai edaran SKB empat menteri. "Minimal kita melihat sampel khusus di Kukar, sejauh mana proses mereka menghadapi wacana PTM tersebut," tambahnya.

Politisi Golkar ini menyebut kendala dalam pembelajaran daring bagi

sebagian wilayah di Kukar. "Karena beberapa kecamatan atau desa tidak memiliki infrastruktur untuk melaksanakan pendidikan secara daring," ungkapnya.

Sehingga, dengan kondisi adanya blankspot di beberapa titik, pihak sekolah pun menggunakan berbagai cara atau metode dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satunya, memanggil orang tua atau wali murid untuk mengambil tugas ke sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada 20 November 2020 lalu telah mengemukakan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB itu, pemerintah pun melakukan sinkronisasi kebijakan untuk memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kantor

Wilayah (Kanwil) atau kantor Kementerian Agama (Kemendikbud) selaku pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi lapangan di daerahnya masing-masing. Adapun pemberian kewenangan ini menentukan iya atau tidaknya kegiatan Belajar Tatap Muka Langsung yang akan dimulai pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, yang jatuh pada di bulan Januari 2021.

Dilansir dari Kemendikbud.go.id, Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kewenangan dalam mengeluarkan izin BTML dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu wilayah kabupaten atau kota serta secara bertahap per wilayah dari kecamatan dan desa atau kelurahan.

"Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah," terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada pengumuman SKB Empat Menteri. (tor/yos)



Gubernur menerima barang untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Nilainya Rp 9,5 miliar. Dari dana Biaya Tak Terduga (BTT). Diabadikan Harian Disway Kaltim (17/12) Pagi.

Lahan

"Mereka pegang surat saja. Tapi tidak dipasang patok dan kondisinya semak belukar misalnya. Nanti, akan ada klaim dari pihak lain lagi. Terbit sertifikat baru lagi, dan terjadi lah tumpang tindih," ujar Zulkifli membeberikan contoh kasus sengketa lahan yang sering terjadi.

Ia juga menyebut, ada sebagian masyarakat yang enggan mengurus sertifikat tanah. Dengan alasan, hal itu menyulitkan pemilik ketika ingin menjual tanahnya. Belum lagi, kewajiban lain untuk mengurus akta notaris dan membayar pajak.

"Kami terus menginformasikan bahwa sertifikat tanah sangat lah penting. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak pemilik lahan. Serta meminimalisir terjadinya masalah penyerobotan lahan."

Dari data BPN Kaltim, ada sekitar 1,9 juta hektare lahan yang sudah masuk dalam daftar sertifikasi tanah. Atau sekitar 69 persen dari total luasan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) di Kaltim. Jumlah itu, menurut Zulkifli termasuk besar. Jika diukur dari luasan APL Kaltim. Karena memang, mayoritas luasan lahan di Kaltim, didominasi oleh kawasan hutan.

"Hampir 70 persen yaa.. Artinya, sebagian besar tanah di Kaltim sudah terdaftar. Baik untuk kategori pemukiman, pertanian, maupun perdagangan jasa. Sesuai arahan fungsi tata ruangnya," jelas Zulkifli.

Pengurusan sertifikat tanah di Kaltim juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. PTSL mempermudah proses pendaftaran tanah di

wilayah desa atau kelurahan.

Dengan menggratiskan biaya pendaftaran dan pendaftaran. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Program ini dinilai cukup berhasil di Kaltim. Dengan bertambahnya jumlah sertifikat tanah setiap tahunnya. Zulkifli membandingkan, sebelum ada program PTSL, sertifikasi tanah hanya sekitar 1.000 bidang per tahun. Namun kini, jumlahnya bisa mencapai 10 ribu hingga 20 ribu bidang per tahun.

"Arahnya, tidak ada lagi sejangkal tanah di setiap desa yang tidak terdaftar. Mau apa pun kategorinya, tanah waqaf, tanah warisan, dan sebagainya," ucap Zulkifli.

BPN Kaltim menarget, setiap daerah mampu memenuhi kelengkapan sertifikasi tanah. Pada tahun 2021

Vaksin

Pemerintah tinggal mengatur impor-pornya dan menetapkan harga jual tertinggi. Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, US 65 dolar. Atau sekitar Rp 800.000.

Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun. Tapi pikiran saya itu bubar. Presiden sudah menegaskan semuanya gratis.

Maka pertanyaan yang muncul setelah itu adalah: bagaimana cara menggilir yang gratis itu. Semua kita rela kalau tenaga medis dan pendukungnya mendapat giliran pertama. Setelah itu akan muncul problem keadilan. Saya membayangkan pemer-

intah lagi sibuk mengatur pengelompokan masyarakat yang begitu banyak.

Memang persoalan terbesar bukan itu. Yang paling sulit adalah bagaimana Indonesia bisa dapat membeli vaksin itu dalam jumlah yang cukup. Kapasitas pabrik vaksin tentu terbatas -dibanding kebutuhan. Apalagi yang sudah pasti mendapat izin baru Pfizer, Amerika. Yang memiliki dua pabrik: di Michigan dan Belgia.

Sedang Moderna, Sinovac, dan Sinopharm segera menyusul -hampir pasti. Yang made in Rusia kelihatannya hanya untuk di sana. Sedangkan buatan Australia -dari University of Queensland- sudah resmi tidak diizinkan. Program vaksinnya sudah dibatalkan tiga minggu lalu. Yakni setelah diuji coba ternyata menimbulkan efek samping yang berbahaya. Yakni justru muncul seperti penyakit HIV.

Padahal saat ditemukan universitas

itu sudah gegap gempita. Sebagai universitas yang terdepan dalam upaya penyelamatan umat manusia. Kita sendiri masih menunggu hasil uji coba tahap 3 vaksin Sinovac di Bandung itu. Yang laporannya akan selesai dikerjakan akhir bulan ini.

Laporan itu tidak bisa dilekas-lekas. Bisa lebih 10.000 lembar. Laporan mengenai satu orang relawan saja bisa lima sampai 10 lembar. Padahal relawannya 1.600 orang. Karena itu, ketika akhir bulan ini laporan itu dikirim ke BPOM, instansi ini harus mengkajinya. Sebelum memberikan izinnya. Berapa lama BPOM mempelajari ribuan lembar laporan hasil uji coba itu?

Di Amerika, juga sama. Laporan hasil uji coba Pfizer dimasukkan ke FDA menjelang liburan "hari raya kalkum" (Thanksgiving). Orang-orang FDA tidak libur. Mereka, tulis Huffington Post, makan daging kalkum sambil membaca laporan uji coba vaksin.

Itulah yang membuat izin di Amerika begitu cepat keluar. Senin kemarin para perawat di semua negara bagian sudah mulai vaksinasi. Demikian juga perawat di rumah-rumah jompo.

Akhirnya tetap Inggris dan Amerika yang jadi pelopor vaksinasi. Inilah vaksinasi tercepat dalam sejarah manusia. Kurang dari setahun setelah pandemi mulai terjadi. Itu karena pandemi ini memang dahsyat. Semua daya dikerahkan habis-habisan.

Juga karena ada orang bernama Donald Trump. Yang sedang menjabat presiden Amerika. Yang membentuk operasi khusus: Operation Warp Speed. Ia memutuskan memberi uang Rp 150 triliun kepada pabrik-pabrik obat yang sanggup menemukan vaksin.

Tapi, yang terpenting adalah para ilmuwan: mereka tidak harus bekerja mulai dari nol. Saat SARS meledak di Tiongkok, mereka sudah giat melakukan penelitian. Bahkan sudah mene-

mukan kuncinya. Hanya saja penelitian itu berhenti di tengah jalan. SARS dengan cepat dipadamkan. Tiongkok, waktu itu, di-lockdown total.

Untungnya SARS belum menular secara luas. Di Amerika hanya ditemui 8 orang yang terkena SARS. Ketika MERS meledak di Timur Tengah juga cepat diatasi.

Maka urgensi memproduksi vaksin virus corona tidak ada lagi. Kalau perusahaan obat memaksakan diri untuk memproduksi, siapa yang membeli. Mereka dibayangi kerugian besar. Lebih baik tidak jadi diproduksi.

Tapi para ilmuwan sudah menemukan RNA messenger. Mereka juga sudah tahu virus corona hanya bergerak di protein DNA. Bahkan mereka sudah menemukan bagaimana membuat "virus tiruan" yang bisa "dipakukan" di protein DNA. Dengan demikian RNA messenger bisa "mengajar" cell untuk melahirkan imun sebagai senjata un-

tuk melumpuhkan "virus tiruan" itu.

Sudah begitu jauh ilmuwan menetapkan virus corona. Maka ketika muncul virus corona baru (Covid-19) mereka sudah punya dasar melangkah. Memang virus corona kali ini jenis baru, tapi jenisnya tetap corona. Yang hanya hidup di protein DNA. Hebatnya, RNA messenger tadi tidak sampai menyentuh DNA. Itulah yang membuat para ahli menegaskan bahwa vaksin Pfizer tidak bisa disebut modifikasi DNA.

Zaman lama hanya mengenal vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Seperti yang diproduksi Sinovac. Covid-19 membuat penemuan baru itu menjadi kenyataan. Kini tinggal seberapa besar pabrik mampu memproduksi. Pasti laku. Bahkan rebutan. Tanpa SARS dan MERS, tidak mungkin vaksin Covid-19 bisa ditemukan dengan begitu cepatnya. (*)